

Bab I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat dewasa ini mengakibatkan kebutuhan serta kepentingan masyarakat semakin beraneka ragam serta kompleks. Hal ini menghendaki peran serta pemerintah yang cukup besar dengan pembangunan disegala bidang.

Perubahan tata Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah. Melalui otonomi daerah diharapkan peranan kabupaten dan kota akan lebih mampu dan mandiri dalam menentukan program pembangunan yang meliputi aspek-aspek yang sesuai dengan aspirasi masyarakat. Sehubungan keterangan tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota diharapkan perlu untuk mengidentifikasi potensi sumber-sumber pendapatan daerah dalam mengelola pembangunan yang sudah diprogramkan.

Dalam penyelenggaraan otonomi daerah diberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional

yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan dan perimbangan keuangan.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah menjelaskan, bahwa sumber-sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi terdiri dari Pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dana bagi hasil dan dana alokasi umum. Sumber pendapatan asli daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari dalam wilayah daerah yang bersangkutan terdiri dari hasil pajak daerah dan lain-lain usaha daerah yang sah.

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi alternatif sumber pembiayaan, sehingga perlu dikembangkan dan dikelola secara profesional untuk memperoleh laba yang nantinya diharapkan menunjang Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya hasil yang diperoleh dari keuntungan tersebut digunakan untuk menambah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam membiayai pelaksanaan pembangunan di daerah.

Salah satu kontribusi Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari hasil Perusahaan Daerah dapat ditelusuri lebih jauh pada perkembangan komponen bagian laba BUMD sebagaimana dikemukakan pada tabel berikut :

Tabel 1
Komposisi Pendapatan Asli Daerah
Tahun Anggaran 2001 – 2005
(Dalam Rupiah dan prosentasenya)

No	Jenis Pendapatan	TA – 2001		TA – 2002		TA – 2003		TA – 2004		TA – 2005	
		Jumlah (Rp)	Prop (%)	Jumlah (Rp)	Prop (%)	Jumlah (Rp)	Prop (%)	Jumlah (Rp)	Prop (%)	Jumlah (Rp)	Prop (%)
1	Pajak Daerah	14.180.994.130	53.13	13.790.363.573	45.26	18.563.559.392	49.05	22.823.695.617	56.37	21.638.279.128	50.60
2	Retribusi Daerah	9.288.904.124	34.80	12.027.609.189	39.48	10.553.883.036	27.88	11.149.392.530	27.54	13.489.576.141	31.54
3	Bagian Laba BUMD	249.200.000	0.93	735.256.653	2.41	1.272.279.876	3.36	1.873.252.536	4.63	2.029.457.138	4.75
4	Penerimaan Lain-lain	2.972.982.062	11.14	3.915.107.874	12.85	7.459.671.517	19.71	4.639.651.181	11.46	5.605.742.166	13.11
	Jumlah PAD	26.692.090.316	100.00	30.468.337.289	100.00	37.849.393.821	100.00	40.485.991.864	100.00	42.763.054.573	100.00

Sumber data : Dinas Pendapatan Kabupten Malang, 2005

Berdasarkan dalam Tabel 1 diatas menyebutkan bahwa kemampuan bagian laba BUMD tidak stabil dan berfluktuasi, artinya kontribusi komponen hasil bagian laba BUMD terhadap proporsi keseluruhan jumlah penerimaan PAD masih rendah. Keadaan ini dapat diduga bahwa kemampuan Perusahaan daerah terbelit dengan kesulitan memperoleh laba yang akan mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk memperkuat modal perusahaan yang berasal dari modal sendiri. Dalam penelitian yang dilakukan Alhabsji (1987) secara nasional mengungkapkan bahwa belum berperannya Perusahaan Daerah sebagaimana yang diharapkan disebabkan oleh masalah pokok yaitu masalah keuangan, sumber daya manusia (SDM) dan pengawasan.

Perkembangan realisasi bagian laba BUMD terhadap target PAD Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2001-2005 dapat dilihat dalam Tabel 2

Tabel 2
Target dan Realisasi Bagian laba BUMD
Tahun Anggaran 2001-2005
(dalam rupiah dan prosentasenya)

No	Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)	Persentase (%)
1	2001	299.200.000	249.200.000	(50.000.000)	-0,17
2	2002	805.256.650	735.256.653	(69.999.997)	-0.09
3	2003	1.743.561.000	1.272.279.876	(471.281.124)	-0.27
4	2004	1.936.562.000	1.873.252.536	(63.309.464)	-0.03
5	2005	2.258.446.000	2.029.457.138	(228.988.862)	-0.10
Jumlah		7.043.025.650	6.159.446.203	(883.579.447)	-0.66
Rata-rata		1.408.605.130	1.231.889.241	(176.715.889)	-0.13

Sumber data : Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kab. Malang 2005

Melihat data dalam Tabel 2 tersebut diatas menunjukkan bahwa pencapaian bagian laba BUMD secara keseluruhan tidak pernah mencapai target yang ditetapkan dengan perubahan rata-rata pertahun -0,13%, artinya kemampuan pengelolaan BUMD Pemerintah daerah kabupaten malang masih berfluktuasi dan belum mencapai target yang ditentukan.

Tujuan utama pendirian dari Perusahaan Daerah ini untuk kepentingan pelayanan publik serta mendapatkan laba yang sifatnya kompetitif dalam arti harus mampu bersaing dengan perusahaan swasta. Karena bagian laba Perusahaan Daerah merupakan salah satu sumber PAD.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan didukung oleh data empiris di atas, maka dapat dirumuskan masalah “Apakah Perusahaan Daerah Jasa Yasa Kabupaten Malang dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah”.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Bagian Laba BUMD yang dikelola oleh Perusahaan Daerah Jasa Yasa Kabupaten Malang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai beberapa manfaat sebagai berikut :

1. Bagi manajemen Perusahaan Daerah, penelitian ini sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan strategi perusahaan dalam upaya peningkatan kinerja keuangan perusahaan ;
2. Bagi Pemerintahan Kabupaten Malang, penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang pengolahan keuangan Perusahaan Daerah dalam menetapkan kebijakan sehingga dapat mendorong peningkatan profitabilitas Perusahaan Daerah.
3. Bagi Pihak Lain, penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan atau sebagai acuan riset bagi peneliti selanjutnya.

